

## **Penerapan *Situational Crime Prevention* dalam Sekuriti Survei: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Jakarta**

Orisa Shinta Haryani  
Universitas Indonesia  
risa.ochynd@gmail.com

**Abstrak:** Lembaga pemasyarakatan (Lapas) merupakan suatu tempat yang secara khusus disiapkan untuk menerima dan melakukan penahanan terhadap pelaku kejahatan. Lapas menjadi tempat bagi narapidana untuk menjalani hukuman dan mendapatkan pembinaan selama periode waktu tertentu berdasarkan hasil putusan hakim persidangan. Oleh karena itu, Lapas memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk mencegah terjadinya kejahatan dan menjaga keamanan di dalam lingkungan Lapas maupun mencegah narapidana melarikan diri dari tempat tersebut. Sekuriti survei yang dilakukan dalam penelitian ini didasarkan pada teori *situational crime prevention* yang memfokuskan pembahasan pada pengamanan fisik suatu tempat. Teori ini juga menjelaskan terdapat *sixteen opportunity reducing technique* yang juga digunakan tolak ukur dalam survei sekuriti yang dilakukan. Hasil dari sekuriti survei yang dilakukan menunjukkan bahwa secara umum pengamanan fisik yang diterapkan di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta telah cukup efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh institusi tersebut.

**Kata kunci:** pengamanan fisik, sekuriti, *situational crime prevention*, lembaga pemasyarakatan, penjara

**Abstract:** A correctional institution is a place specially prepared to receive and carry out detention of perpetrators of crime. Lapas become a place for prisoners to serve their sentences and receive guidance for a certain period based on the results of the trial judge's decision. Therefore, Lapas has a big responsibility to prevent the occurrence of crime and maintain security within the Lapas environment and prevent prisoners from escaping. The survey security conducted in this study is based on the theory of situational crime prevention, which focuses on discussing the physical security of a place. This theory also explains that there is a sixteen opportunity reducing technique, which is also used as a benchmark in a security survey conducted. The security survey results showed that in general, the physical security implemented in Cipinang Class I Lapas, Jakarta was sufficient to achieve the institution's goals.

**Key words:** physical security, security survey, *situational crime prevention*, correctional institution, prison

### **Pendahuluan**

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah sebagai tempat bagi narapidana untuk menjalani hukuman dan mendapatkan pembinaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam putusan persidangan. Menurut Don C Gibon dalam Mardjono (2007) disebutkan bahwa pembinaan terhadap pelanggar hukum di tujuhan kepada perubahan sikap artinya bahwa manakala orang tersebut saat di dalam maupun setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tidak akan mengulangi perbuatannya.

Terjadinya kejahatan ataupun pelanggaran yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dewasa ini tentunya tidak terlepas dari sistem pengamanan, pengamanan yang baik tentunya sangat mendukung di dalam upaya pemasyarakatan karena tanpa adanya dukungan keamanan yang baik maka mustahil akan tercipta suatu upaya pemasyarakatan yang kondusif.

Situasi kondusif ini menjadi kebutuhan penting bagi seluruh kegiatan berbangsa dan bernegara baik instansi, swasta, maupun pemerintahan dan tidak terkecuali Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Keamanan menjadi suatu hal yang penting guna mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam pemasyarakatan. Pada akhirnya upaya untuk menjaga keamanan ini akan mendorong tercapainya tujuan pemasyarakatan itu sendiri.

Menurut Hadiman (2010) keamanan adalah keadaan sesuatu yang memberikan perlindungan dari segala ancaman sehingga di dalamnya meliputi rasa aman, bebas dari rasa takut, kekhawatiran, keraguan, serta perasaan kepastian dan keselamatan. Selain itu Hadiman (2010) juga menyebutkan bahwa pada dasarnya setiap manusia membutuhkan sekuriti di lokasi-lokasi sebagai berikut;

- Tempat-tempat pemukiman
- Ditempat manusia melakukan kegiatan
- Pada perjalanan dari pemukiman menuju ke tempat kegiatan ataupun sebaliknya
- Penyimpanan barang-barang yang dibutuhkan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai suatu tempat dimana para pelanggar hukum berkumpul dan berkegiatan maka tentu saja Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) ini memiliki resiko terjadinya kejahatan yang sangat besar.

Sekuriti sendiri sebenarnya merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengamankan sesuatu agar bebas dari gangguan fisik maupun psikis, kekhawatiran, resiko dan terwujudnya perasaan tenang dan damai. Sedangkan jika memfokuskan pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) maka yang bertugas untuk menciptakan keamanan atau menjaga keamanan adalah Personil Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP).

Upaya untuk menciptakan dan menjaga keamanan di suatu lokasi tidak hanya membutuhkan petugas keamanan saja tetapi juga harus ditunjang dengan arsitektur bangunan, sarana prasarana dan sistem pengamanan yang di terapkan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Lembaga Pemasyarakatan memiliki resiko yang sangat besar sebagai tempat terjadinya kejahatan. Seperti beberapa peristiwa yang pernah terjadi di dalam Lapas Kelas I Cipinang yaitu;

Orisa Shinta Haryani  
Penerapan *Situational Crime Prevention* dalam Sekuriti Survei: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I  
Cipinang, Jakarta

- Pada 13 Juni 2012 terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh 4 narapidana terhadap petugas Lapas Cipinang karena melakukan pemeriksaan yang ketat terhadap barang-barang narapidana setelah jam besuk berakhir (Atmi, 2012).
- Pada April 2013 terjadi perkelahian antar narapidana hingga akhirnya berujung dengan penusukan salah satu pihak (Andry, 2013).
- Pada 5 Maret 2015 terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh petugas Lapas Cipinang terhadap narapidana. Petugas melakukan pemukulan narapidana yang menjadi korban dengan menggunakan balok kayu ([edisinews.com](http://edisinews.com), 2015).

Jika dilihat memang mayoritas peristiwa yang terjadi adalah perkelahian dan penganiayaan namun sebenarnya di dalam Lapas juga terdapat resiko terjadinya kejahatan-kejahatan lainnya seperti:

1. Penyelundupan barang-barang yang dilarang masuk ke dalam Lapas
2. Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lapas
3. Narapidana yang melarikan diri
4. Demo yang dilakukan oleh narapidana
5. Pemerasan dan Pungutan Liar (Pungli)
6. Kebakaran di dalam Lapas baik yang tidak sengaja maupun yang disengaja dan dilakukan oleh narapidana
7. Masuknya orang asing yang bukan merupakan petugas Lapas ataupun Narapidana yang bertujuan tidak baik

Berdasarkan yang telah disebutkan diatas maka tentu saja pihak Lapas Cipinang harus membangun suatu sistem pengamanan yang dapat digunakan secara efektif untuk mencegah dan menangani terjadinya tindakan-tindakan tersebut sehingga tidak mengakibatkan kerugian baik pada individu yang ada di dalamnya atau pada institusi tersebut. Djamin (2010) menyatakan bahwa untuk mencegah terjadinya kerugian (*loss prevention*) sangat diperlukan adanya manajemen sekuriti yang baik dengan meliputi aspek-aspek berikut:

- Sekuriti fisik adalah pengamanan fasilitas dan lingkungan organisasi serta seluruh isinya (keamanan gedung, peralatan/sarana prasarana), kehilangan atau kerusakan akan mengakibatkan kerugian besar.
- Sekuriti personil adalah menyangkut pengaturan pegawai dan tamu untuk berbagai urusan
- Sekuriti informasi adalah menyangkut komunikasi dalam lembaga masyarakat dengan pihak luar.

Kegiatan sekuriti bertujuan untuk menjamin suatu kondisi akan adanya rasa aman dan keamanan itu sendiri merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan pembinaan di dalam Lapas. Oleh karena harus mendapatkan perhatian yang serius.

Penyelenggaraan manajemen sekuriti yang dilakukan di dalam Lapas sudah tentu memiliki tujuan untuk mencegah terjadi tindakan-tindakan yang tidak diinginkan dan juga menangani kejadian-kejadian yang menjadi ancaman bagi keamanan Lapas dengan cepat. Oleh karena itu dalam proses penulisan makalah ini kami melakukan sekuriti survey di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana manajemen sekuriti yang dilakukan di dalam Lapas tersebut. Sehingga dapat dilihat apakah manajemen sekuriti yang dilakukan telah mampu berperan sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan penugasan yang diberikan maka kami kelompok I akan membahas manajemen sekuriti khususnya mengenai infrastruktur pengamanan fisik dan sistem operasional yang diterapkan di dalam Lapas Kelas I Cipinang.

### **Strategi Pencegahan Kejahatan dan *Situational Crime Prevention***

Menurut Kingsbury dalam tulisan Fennelly (1989), pencegahan kejahatan adalah antisipasi, pengenalan dan penilaian resiko kejahatan dan usaha untuk menghilangkannya atau mengurangnya. Selain itu dalam buku Schneider dan Kitchen yang berjudul *Planning for Crime Prevention: A TransAtlantic Perspective* (2004), pencegahan kejahatan adalah:

*“A pattern of attitudes and behaviour directed both at reducing the threat of crime and enhancing the sense of safety and security, to positively influence the quality of life in our society and to help develop environments where crime cannot flourish.”*

Dengan kata lain definisi tersebut mencoba menjelaskan mengenai, pencegahan kejahatan itu berawal dari masyarakatnya dalam bersikap dan berperilaku. Sedangkan sikap dan perilaku itu akan mempengaruhi kejahatan yang ada di dalamnya dan pengembangan lingkungan mereka. O’Block dalam bukunya yang berjudul *Security and Crime Prevention* (1981), memberikan definisi tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu pengantisipasi, pengenalan, penafsiran terhadap resiko kejahatan, dan beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan kejahatan. Tidak semua bentuk pencegahan kejahatan sama, tergantung dari tujuannya. Selain itu Jeffery dalam bukunya yang berjudul *Crime Prevention Through Environmental Design* menjelaskan mengenai *crime prevention* (1997), memberikan definisi pencegahan kejahatan adalah:

*“As a basic system it refers to primary, not secondary or tertiary prevention. It takes place before the crime occurs, it deals with the environments in which crimes are committed, and it makes use of direct rather than indirect control over behavior.”*

Dapat didefinisikan bahwa pencegahan kejahatan merupakan tindakan yang dapat dilakukan sebagai tindakan yang dilakukan untuk melindungi diri atau calon korban dengan melakukan kontrol secara langsung maupun tidak langsung atas perilaku calon pelaku tindak kejahatannya. Laycock dan Tilley dalam jurnal penelitiannya yang berjudul *Implementing Crime Prevention* (1995), memberikan penjelasan mengenai implementasi dari pencegahan kejahatan.

Dalam melakukan implementasi pencegahan kejahatan dibutuhkan kategori konsep dalam membantu memutuskan model dari pencegahan kejahatan yang sesuai untuk diimplementasikan. Kemudian, Brantingham dan Faust (1976) mendeskripsikan dan membagi model konseptual dari pencegahan kejahatan menjadi tiga, antara lain:

1. Pencegahan primer yang ditujukan kepada modifikasi kondisi kriminogenik dalam lingkungan fisik dan sosial secara luas;
2. Pencegahan sekunder ditujukan untuk indentifikasi awal dan intervensi dari kehidupan individu atau grup dalam keadaan kriminogenik;
3. Pencegahan tersier ditujukan kepada pelaku atau residivis agar tidak melakukan tindak kejahatan lagi.

Salah satu bentuk pencegahan kejahatan adalah pencegahan kejahatan situasional. Clarke dalam jurnal yang berjudul *Situational Crime Prevention: Its Theoretical Basis and Practical Scope* (1983), menjelaskan bahwa strategi pencegahan kejahatan situasional lebih mengarah pada bentuk kejahatan yang lebih spesifik dan berkaitan dengan manajemen, desain atau manipulasi lingkungan secara sistematis dan permanen dalam mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Strategi pencegahan kejahatan situasional dilakukan sebagai alternatif dalam upaya pencegahan kejahatan yang lebih melihat pada faktor-faktor situasional dan merupakan kritik terhadap teori kriminologi tradisional yang hanya fokus pada faktor sosial dan psikologis sebagai penyebab dari tindak kejahatan. Clarke dalam jurnal yang berjudul *Situational Crime Prevention* (1995), mengembangkan penelitian yang sebelumnya dan masih berkaitan dengan strategi pencegahan kejahatan situasional.

Pengembangan yang dilakukan adalah dengan mulai dilakukannya upaya target hardening yang cukup sederhana hingga pengembangan metode yang cukup canggih yaitu, *deflecting offender* dan *reducing inducement* yang dapat menghasilkan diffusion of benefit. Dasar teoritis dari pencegahan kejahatan secara situasional semakin diperkuat dengan mengembangkan pendekatan aktivitas rutin dan pilihan rasional.

Berdasarkan formulasi yang didapatkan dari pilihan rasional, dapat diasumsikan bahwa kejahatan merupakan perilaku purposive yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelaku kejahatan seperti uang, status, seks, maupun sekedar kesenangan semata. Selain itu, dijelaskan juga mengenai konsep CPTED (*Crime Prevention Through Environmental Design*) atau *Defensible Space* yang merupakan bagian dari strategi pencegahan kejahatan situasional. Akan tetapi, keduanya lebih berfokus kepada pengamanan fisik atau desain bangunan, sedangkan pencegahan kejahatan situasional lebih kepada pengurangan kesempatan atau peluang seseorang dalam melakukan tindak kejahatan.

Kemudian dijelaskan juga bahwa tujuan utama jurnal Clarke (1997) terkait strategi pencegahan kejahatan, ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai pengetahuan yang diperoleh atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencegahan kejahatan dan untuk menunjukkan kerangka kriminologis terkait pembelajaran tentang pencegahan kejahatan yang terbagi ke dalam empat komponen kerja:

- Dasar teori dalam menggambarkan aktivitas rutin dan pendekatan pilihan rasional. ;
- Suatu metodologi standar berdasarkan pada penelitian paradigma aksi (*action research paradigm*);
- Suatu teknik pengurangan peluang;
- Suatu bagan praktek evaluasi termasuk studi mengenai pemindahan (*studies of displacement*).

Teknik pengurangan peluang pada strategi pencegahan kejahatan situasional yang dikemukakan oleh Clarke (1997), terbagi ke dalam empat bagian besar dan masing-masing terdapat empat teknik pengurangan peluang. Berikut adalah gambar tabel dari teknik pengurangan peluang yang dijelaskan oleh Clarke (1997):

**Tabel 1. Enam Belas Teknik Pengurangan Peluang (*Sixteen Opportunity Reducing Techniques*)**

<b>Increasing Perceived Effort</b>	<b>Increasing Perceived Risks</b>	<b>Reducing Anticipated Rewards</b>	<b>Removing Excusee</b>
1.Target hardening	5.Entry/exit screening	9.Target removal	13.Rule setting
2.Access control	6.Formal surveillance	10.Identifying property	14.Stimulating conscience
3.Deflecting offenders	7.Surveillance by employees	11.Reducing temptation	15.Controlling disinhibitors
4.Controlling facilitators	8.Natural surveillance	12. Denying benefits	16.Facillitating compliance

Sumber : Clarke, Ronald V. (1997). *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies* (telah diolah kembali)

Berikut penjelasan dari masing-masing teknik yang terdapat dalam tabel:

(1) *Increasing Perceived Effort* (Peningkatan Upaya Pencegahan Kasat Mata)

Peningkatan upaya pencegahan ini antara lain terdiri dari *target hardening*, *access control*, *deflecting offenders* dan *controlling facilitators*. Penjabaran dari ke-4 teknik pencegahan kasat mata tersebut adalah sebagai berikut:

- (a) *Target hardening* (pengerasan terhadap Target) Merupakan cara efektif dalam mengurangi peluang terjadinya kejahatan dalam menghalangi pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya dengan memberikan penghalang tambahan pada target, contohnya seperti penggunaan kunci, lemari besi ataupun ruang penyekat dengan material yang sangat kuat. Webb dalam penelitiannya yang berjudul *Steering Column Locks and Motor Vehicle Theft: Evaluations From Three Countries* (1994), melakukan penelitian mengenai evaluasi terhadap efek yang timbul atas diberlakukannya peraturan tentang penggunaan kunci kemudi pada kendaraan. Peraturan tersebut diberlakukan di tiga negara berbeda yaitu, Jerman, Britain, dan Amerika Serikat. Hasilnya, terdapat efek positif atas penggunaan kunci kemudi kendaraan yang diberlakukan dalam tiga negara tersebut, karena cukup efektif dalam menurunkan tingkat pencurian kendaraan bermotor tersebut.
- (b) *Access control* (kontrol terhadap akses/jalanan) Merupakan langkah-langkah yang dipergunakan untuk mencegah pelaku yang berpotensi masuk ke dalam sebuah kawasan atau lingkungan dengan mengawasi jalur masuk ke dalam/keluar lingkungan tersebut. Poyner dalam jurnal tentang penelitiannya yang berjudul *Lesson from Lisson Green An Evaluation of Walkway Demolition on a British Housing Estate* (1987) yang berfokus kepada evaluasi dari efek pembongkaran atas tujuh akses atau jalan pada perumahan umum di London dalam mengurangi tingkat kejahatan kendaraan. Hasil yang didapat dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembongkaran atas tujuh jalan sebagai akses pada perumahan umum di London tersebut berpengaruh terhadap tingkat kejahatan kendaraan yang terjadi dan berpengaruh secara langsung atas tingkat kejahatan yang ada (Poyner, 1986).
- (c) *Deflecting offender* (pembelokan terhadap pelaku) Merupakan langkah dalam menjauhkan pelaku kejahatan dari target kejahatan. Cara untuk menjauhkan dari target kejahatan misalnya dengan menggunakan cara, melakukan ronda keliling atau patroli, melakukan pengawasan kepada orang-orang yang dicurigai dan berpotensi melakukan tindak kejahatan. Kemudian, bisa juga memberi jarak antara pelaku dengan target atau border. Robert J.

Sampson dan Jacquelin Cohen melakukan penelitian replikasi dan pengembangan dengan judul *Deterrent Effects of the Police on Crime: A Replication and Theoretical Extension* (1988), dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wilson dan Boland pada tahun 1978 mengenai efek pencegahan kejahatan oleh polisi di kota-kota Amerika Serikat dan dihubungkan dengan kontrol penyimpangan pada kaum urban. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah faktor rasial yang mempengaruhi tindakan agresif yang dilakukan polisi terhadap kaum minoritas yaitu, kaum kulit hitam Amerika. Pencegahan kejahatan dilakukan oleh pihak kepolisian dengan menggunakan tindakan legalistik yang mengarah kepada kebijakan patroli proaktif. Terdapat efek secara langsung maupun secara tidak langsung dari tindakan legalistik kepolisian tersebut. Efek secara langsung dari tindakan kepolisian tersebut yaitu, memberi pengaruh kepada persepsi masyarakat terkait rasa khawatir atau gentar untuk melakukan tindakan ilegal. Sedangkan efek secara tidak langsung yang diperoleh yaitu, berpengaruh kepada tingkat kejahatan yang terjadi, karena resiko tertangkap lebih besar dari pada sebelum diadakannya kebijakan patroli proaktif oleh pihak kepolisian. Sehingga hasil yang diperoleh dari tindakan proaktif kepolisian terkait kebijakan patroli menunjukkan terdapat pengaruh yang baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menurunkan tingkat kejahatan.

- (d) *Controlling facilitators* (pengontrol fasilitator) Merupakan cara yang dilakukan dalam mengendalikan alat-alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Lester dalam jurnalnya yang berjudul *Controlling Crime Facilitators: Evidence From Research On Homicide and Suicide* (1993), melakukan analisa tentang efek dari pembatasan akses terhadap alat yang dapat dipergunakan sebagai upaya bunuh diri atau pembunuhan seperti penggunaan senjata api, gas, obat-obatan untuk bunuh diri. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa terdapat efek preventif terhadap pembatasan tersebut, dan sangat berpengaruh terhadap berkurangnya angka bunuh diri. Namun, pembatasan akses terhadap peralatan yang digunakan untuk bunuh diri tersebut menimbulkan pola baru dalam tindakan bunuh diri.
- (2) *Increasing Perceived Risks* (Peningkatan Resiko Secara Kasat Mata) Peningkatan resiko secara kasat mata ini terdiri 4 teknik antara lain entry/exit screening, formal surveillance, surveillance by employees dan natural surveillance dengan penjelasan sebagai berikut:



- (a) *Entry/exit screening* (skrining terhadap pintu masuk/keluar) Cara yang dipergunakan dalam mengawasi keluar masuknya barang melalui pintu masuk/keluar dengan melakukan skrining. Berbeda tujuan antara skrining pada pintu masuk/keluar dengan pengawasan pada akses kontrol untuk mencegah tindak kejahatan. Skrining pintu masuk/keluar lebih berfokus kepada pendeteksian bagi seseorang atau benda sebagai syarat untuk dapat masuk ataupun keluar kawasan yang dilakukan penjagaan.
- (b) *Formal surveillance* (pengawasan secara formal) Merupakan pencegahan kejahatan dengan melakukan pengawasan terhadap suatu kawasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun petugas keamanan. Tujuan utama dilakukannya pengawasan formal adalah untuk menimbulkan efek penggentar terhadap pelaku kejahatan karena resiko tertangkapnya menjadi tinggi. Brandon C. Welsh dan David P. Farrington dalam *Effects of Closed-Circuit Television on Crime*, mengumpulkan data dari berbagai lembaga keamanan dan literatur serta membandingkan hasil evaluasi dari penggunaan CCTV dari beberapa lokasi penelitian. Tempat-tempat dilakukan penelitian adalah ruang publik seperti, tempat parkir dan perumahan. Hasil yang didapatkan adalah, CCTV memiliki efek yang signifikan terhadap kejahatan walaupun secara keseluruhan hanya mampu mengurangi sebesar 4%. Dari 9 studi yang dilakukan memperlihatkan bahwa terdapat efek dari pemasangan CCTV terhadap tindak kejahatan di UK. Sebaliknya, dari 9 studi lainnya tidak memperlihatkan adanya efek dari pemasangan CCTV terhadap tindak kejahatan yang terjadi, termasuk di dalamnya 5 studi yang dilakukan di Amerika Utara. Sehingga, CCTV lebih efektif digunakan di lokasi parkir untuk mengurangi tingkat kejahatan pencurian kendaraan dibandingkan tindak kejahatan kekerasan di ruang publik lainnya (Welsh & Farrington, 2003).
- (c) *Surveillance by employees* (pengawasan dari para pekerja) Merupakan pencegahan kejahatan dengan memanfaatkan manusia yang bekerja di lokasi tersebut dengan peran tambahan sebagai pengawas. Selain fungsi utama mereka sebagai pekerja, para pekerja terutama yang berhubungan dengan publik juga memiliki peran sebagai pengawas berdasarkan posisi mereka bekerja. Menurut Eck dan Felson (1995) dalam jurnal Clarke (1997), pengawasan yang dilakukan tersebut termasuk ke dalam pengaturan lokasi seperti petugas penjaga toko, penjaga pintu hotel, penjaga taman, petugas parkir dan konduktor kereta yang bertanggung jawab atas lokasi dan objek di tempat mereka bekerja. Seperti

penelitian yang dilakukan di Kanada oleh Waller dan Okihiro (1979) bahwa gedung apartemen dengan menggunakan petugas penjaga pintu atau doormen mengurangi resiko dalam terjadinya tindak pencurian.

- (d) *Natural surveillance* (pengawasan secara alami) Menurut Blakeman (1993) dalam disertasi Sudiadi yang berjudul *Defensible Space: Operasionalisasi Model Pencegahan Kejahatan Secara Kolektif di Perumahan* (2003) bahwa *Natural Surveillance* mengacu kepada kemampuan penduduk atau masyarakat untuk mengawasi dan mengamati secara terus menerus pada lingkungan mereka. Kemudian, Clarke (1997) menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan oleh masyarakat tersebut dapat dipermudah misalnya, dengan memangkas semak-semak yang ada di depan rumah agar terlihat lebih terang, penambahan pencahayaan interior pada bank pada malam hari, atau penerangan jalanan pada malam hari.
- (3) *Reducing Anticipated Rewards* (Pengurangan Penghargaan yang Diharapkan Pelaku). Teknik pencegahan dengan tujuan pengurangan penghargaan antara lain; target removal, identifying property, reducing temptation dan denying benefits. Penjelasan masing-masing teknik sebagai berikut:
- (a) *Target removal* (pemindahan target) Merupakan teknik pencegahan kejahatan dengan melakukan penghapusan target kejahatan. Contoh pencegahan kejahatan dengan upaya penghapusan target seperti yang dilakukan di Inggris dan Australia yaitu, penggantian telepon umum yang menggunakan kotak kaca dengan bilik untuk menghindari pengerusakan seperti yang telah sering terjadi. Selain itu, diberlakukan juga penggunaan kartu telepon atau phonecard untuk menghindari pembobolan uang koin pada telepon umum.
- (b) *Identifying property* (pengidentifikasian objek atau benda) Merupakan teknik pencegahan kejahatan dengan cara mengidentifikasi barang yang dimiliki dengan memberikan tanda pengenal ataupun nama pada barang yang dimiliki, dalam hal ini khususnya kendaraan bermotor. Program pengidentifikasian kendaraan misalnya seperti pendaftaran kendaraan bermotor yang mulai dilakukan oleh U.S. pada permulaan abad ini. Semua kendaraan yang terjual diberikan nomor identifikasi pada kendaraan (VIN) sebagai bukti kepemilikan. Akan tetapi, semakin maraknya tindak pencurian kendaraan bermotor yang terjadi sehingga penandaan tidak hanya pada nomor kendaraan saja namun, diberikan pada seluruh bagian kendaraan.

- (c) *Reducing temptation* (pengurangan minat pelaku) Merupakan pengurangan keinginan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan dan mencegah niat seseorang untuk menjadi pelaku kejahatan. Pengurangan keinginan bagi pelaku dapat dilakukan seperti contoh, tidak menggunakan perhiasan di saat akan keluar rumah atau bepergian, atau tidak menggunakan perhiasan mewah melainkan menggunakan perhiasan perak yang nilainya tidak seberapa
- (d) *Denying benefits* (penghilangan kebermanfaatan objek) Teknik pencegahan kejahatan ini masih berkaitan dengan Reducing Temptation namun, terdapat perbedaan secara konseptual antara keduanya. Penghilangan kebermanfaat atau Deying Benefits merupakan pencegahan kejahatan dengan cara menghilangkan nilai manfaat hasil dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelanggar. Seperti contoh pengembangan teknologi pada radio mobil yang telah dipergunakan di Australia, Jerman dan Amerika Serikat dalam mengurangi kebermanfaat bagi pelaku pencurian untuk mengambilnya karena tidak bisa langsung dipergunakan karena membutuhkan kode PIN untuk bisa menggunakannya.
- (4) *Removing Excuses* (Penghilangan Alasan Melakukan Kejahatan) Sedangkan pencegahan kejahatan dengan tujuan menghilangkan alasan pelaku untuk melakukan kejahatan antara lain; rule setting, stimulating conscience, controlling disinhibitors dan facilitating compliance sebagai berikut:
- (a) *Rule setting* (pemberlakuan peraturan) Merupakan satu hal yang penting dalam pencegahan kejahatan situasional yang bertujuan menghapuskan ambiguitas setiap perilaku seorang dengan menggunakan prosedur yang diterapkan dalam suatu lingkungan. Seperti contoh, penerapan peraturan pada sebuah restoran terhadap pelanggan yang melakukan pemesanan tempat atau reservasi pada restoran tersebut haruslah meninggalkan nomor telepon yang bisa dihubungi dan juga meninggalkan nomor kartu kredit pemesan untuk menghindari pembatalan pemesanan sehingga bisa dikenakan denda atau untuk menghindari tindak penipuan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
- (b) *Stimulating conscience* (peningkatan kesadaran) Menurut Clarke dan Homel (1997) merupakan teknik pencegahan kejahatan dengan menggunakan kontrol sosial informal masyarakat dengan fokus bentuk kejahatan tertentu atau terbatas. Pencegahan kejahatan dengan teknik stimulating conscience memang tidak membawa kelangsungan perubahan sikap secara umum dan hanya kepada

merangsang hati nurani masyarakat umum untuk tidak melakukan tindak pelanggaran.

- (c) *Controlling disinhibitors* (pengendalian faktor pemicu) Kejahatan terjadi tidak hanya karena adanya peralatan yang dijadikan senjata oleh pelaku, akan tetapi juga karena adanya psikologis disinhibitors atau perilaku impulsif dari pelaku karena ada faktor yang mempengaruhi untuk muncul. Menurut Makris (1996) dalam Clarke (1997) menyebutkan bahwa contoh pencegahan kejahatan dengan teknik controlling disinhibitors yang telah dilakukan di Amerika adalah penanaman V-chip pada televisi yang memungkinkan setiap orang tua melakukan pemblokiran program kekerasan pada televisi yang dapat dilihat anak-anak, sehingga dapat mengendalikan perilaku impulsif atas kekerasan yang dapat ditiru oleh anak-anak tersebut.
- (d) *Facilitating compliance* (penyediaan fasilitas publik) Merupakan penyediaan fasilitas publik yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran aturan atau pencegahan kejahatan. Contoh pencegahan kejahatan dengan teknik pemenuhan fasilitas seperti, penyediaan fasilitas taksi bagi seseorang dalam keadaan mabuk untuk menghindarkannya mengemudi sendiri dalam kondisi tidak sadar, penyediaan tempat sampah untuk mengurangi pembuangan sampah secara sembarangan, penyediaan fasilitas papan grafiti untuk menghindari vandalisme yang melakukan coretan pada dinding, dan juga seperti penyediaan loket peminjaman pada perpustakaan sehingga pengunjung dapat melakukan peminjaman pada perpustakaan tersebut.

Seperti yang dijelaskan bahwa terdapat enam belas teknik dalam pengurangan peluang kejahatan yang terbagi ke dalam empat bagian besar memiliki fungsi tersendiri dalam upaya pencegahan kejahatan. Akan tetapi, setiap teknik memiliki tujuan yang sama yaitu, dilakukan dalam rangka mengurangi peluang dan mengurangi resiko terjadinya tindak kejahatan meskipun pelaku berada dalam satu ruang lingkup atau berada dekat dengan target, seperti yang dapat digambarkan dalam segitiga kejahatan. Dengan teknik pengurangan tersebut maka secara langsung maupun tidak langsung dapat membatasi kesempatan bagi calon pelaku kejahatan atau potensi pelaku kejahatan.

Seperti yang dijelaskan bahwa terdapat enam belas teknik dalam pengurangan peluang kejahatan yang terbagi ke dalam empat bagian besar memiliki fungsi tersendiri dalam upaya pencegahan kejahatan. Akan tetapi, setiap teknik memiliki tujuan yang sama yaitu, dilakukan dalam rangka mengurangi peluang dan

mengurangi resiko terjadinya tindak kejahatan meskipun pelaku berada dalam satu ruang lingkup atau berada dekat dengan target, seperti yang dapat digambarkan dalam segitiga kejahatan. Dengan teknik pengurangan tersebut maka secara langsung maupun tidak langsung dapat membatasi kesempatan bagi calon pelaku kejahatan atau potensi pelaku kejahatan.

**Gambar 1. Crime Triangle**



(Sumber: R. V. Clarke & John Eck, 2003)

*Crime triangle* mempresentasikan bahwa kejahatan akan sangat mungkin terjadi apabila pelaku (*offender*) dan korban (*victim*) atau target berada pada saat bersamaan dalam sebuah tempat (*place*). Suatu kejahatan dapat terjadi apabila ada calon pelaku yang termotivasi untuk melakukan kejahatan terhadap calon korban atau target yang dirasa cukup rentan dan berada secara bersamaan pada sebuah tempat.

Selain itu, pada segitiga yang lebih besar, terdapat guardian, manager, dan handler. Guardian atau penjaga terbagi menjadi penjaga informal yang terdiri dari masyarakat, teman dan orangtua, dan penjaga formal yang terdiri dari polisi. Sedangkan, manager adalah orang yang bertugas memanipulasi desain tempat serta bertanggung jawab terhadap tempat tersebut. Terakhir, handler adalah orang yang bertugas menjaga atau menangani tindakan calon pelaku. *Handler* dapat dicontohkan sebagai orang tua yang dapat mengontrol tindakan anak yang dapat menjadi calon pelaku yang potensial. Absennya ketiga poin diatas semakin membuat calon korban akan mudah untuk diserang.

### **Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Jakarta**

Lapas Kelas I Cipinang merupakan bangunan yang didirikan oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1918. Pada awalnya hanya berbentuk satu Lapas saja tetapi pada perkembangannya akhirnya dibagi menjadi tiga bangunan yaitu:

- a) Lapas Kelas IIA Narkotika
- b) Lapas Kelas I Cipinang
- c) Rutan Kelas IIA Cipinang

Lapas Kelas I Cipinang sendiri dibangun di atas tanah seluas 3,5 hektar. Lapas ini berada di Jalan Raya Bekasi Jakarta Timur Nomor 170 Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur. Berdasarkan letak geografisnya maka Lapas Kelas I Cipinang ini berbatasan dengan:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan perumahan penduduk
- b) Sebelah Barat berbatasan dengan Lapas Kelas IIA Narkotika
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Bekasi Timur dan Rel Kereta Api
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Cipinang Jaya

Lapas Kelas I Cipinang sendiri memiliki 3 gedung yang terpisah. Gedung I luasnya 1.078,63 m<sup>2</sup> yang terdiri dari 3 lantai dan gedung ini khusus diperuntukkan sebagai Kantor Kepegawaian, Kantin, Koperasi. Pada intinya di Gedung I Penjagaan tidak terlalu ketat karena narapidana tidak memiliki akses untuk berada di Gedung I. Sehingga gedung tersebut hanya dikelilingi dengan pagar kawat baja dan memiliki 2 pintu masuk di depan dan belakang. Pintu depan digunakan untuk petugas ataupun tamu yang masuk dan kemudian pintu kedua adalah pintu yang berada di belakang dan pintu tersebut menghubungkan dengan pintu Gedung 2.

Sedangkan Gedung II ini memiliki luas 1.096,50m<sup>2</sup>. Gedung ini terdiri dari 2 lantai dan merupakan gedung yang diperuntukkan bagi narapidana berkegiatan. Dalam gedung ini terdapat Ruang Kunjungan, Klinik, Ruang Registrasi, Ruang Keamanan, Aula bagi Narapidana, dan ruangan lainnya. Berdasarkan alasan karena Gedung 2 merupakan gedung yang bersinggungan langsung dengan narapidana maka pengamanannya juga berbeda dan lebih ketat dibandingkan dengan Gedung I.

Sedangkan Gedung III luasnya 4.471,00 m<sup>2</sup> dan hanya terdiri satu lantai saja. Gedung ini sebenarnya merupakan Blok Sel bagi para narapidana. Blok Sel ini biasanya digunakan narapidana untuk tidur di malam hari. Selain Blok Sel, di dalam Gedung III ini terdapat Masjid, Dapur Umum, Gereja, dan Wihara yang dapat digunakan oleh petugas maupun narapidana untuk beribadah.

Menurut data bulan Juni 2016 saat ini jumlah narapidana dan tahanan yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang sebanyak 2.928 orang. Sedangkan menurut data Mei 2016 jumlah Petugas Lapas Kelas I Cipinang secara keseluruhan adalah 300 orang dan petugas yang memiliki fungsi pengamanan berjumlah 143 orang. Akan tetapi dari 143 orang tersebut sudah termasuk petugas administrasi dan staff sehingga tidak melakukan tugas pengamanan.

## 1. Infrastruktur Pengamanan Fisik

### (a) Satuan Pengamanan

Petugas pengamanan di dalam Lapas memang berbeda dengan Satuan Pengamanan di tempat-tempat lainnya. Petugas pengamanan di dalam Lapas bukan berasal dari Satuan Pengamanan (Satpam) dari Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP). Tenaga pengamanan di dalam Lapas disebut dengan Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP).

KPLP tidak hanya bertanggung jawab masalah pengamanan di dalam Lapas tetapi juga bertanggung jawab terhadap semua pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik oleh narapidana maupun dilakukan oleh petugas. KPLP sendiri memiliki sebuah Tim Cepat Tanggap yang disebut dengan Tim Buser. Tim Buser ini dibagi ke dalam 2 regu yakni Regu A dan Regu B dimana Regu A berkekuatan 16 orang sedangkan Regu B berkekuatan 15 orang. Tugas-tugas yang diemban oleh Tim Buser KPLP antara lain;

- 1) Melakukan pengeledahan langsung ke kamar-kamar hunian baik secara berkala maupun secara dadakan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menekan seminimal mungkin barang-barang yang dilarang masuk ke dalam hunian dan mencegah terjadinya gangguan keamanan. Barang-barang yang dimaksud meliputi senjata tajam, handphone, ataupun narkoba.
- 2) Melakukan pengintaian atau pemantauan terhadap gejala narapidana bila akan melakukan kerusuhan, pemberontakan dan sebagainya. Selanjutnya KPLP ini berkewajiban untuk menyelesaikan berbagai gangguan keamanan dan ketertiban seperti perkelahian, kerusuhan, pemberontakan dan sebagainya.
- 3) Melakukan kontrol atau patroli setiap waktu baik secara berkala dan tetap maupun yang dilakukan secara insidental
- 4) Melakukan pengawalan penghuni yang akan keluar Lapas. Dalam melakukan tugas ini biasanya petugas akan meminta bantuan dari pihak kepolisian untuk mengawal. Kegiatan pengawalan dilakukan apabila terdapat penghuni yang akan berobat ke Rumah Sakit rujukan di luar kompleks Lapas, penghuni yang dipindahkan ke Lapas lainnya, penghuni yang mendapatkan ijin keluar Lapas secara resmi, dan penghuni yang mendapatkan pembinaan luar (asimilasi dan cuti mengunjungi keluarga)
- 5) Mencatat kejadian-kejadian di lingkup wilayah tugas yang meliputi kunjungan, kebersihan luar Lapas, pengiriman penghuni keluar Lapas, dan memeriksa penghuni baru baik fisik maupun kelengkapan administrasi
- 6) Membantu petugas administrasi melakukan pengawasan terhadap pengunjung pada jam-jam kunjungan. Kegiatan yang dilaksanakan

meliputi pengawasan pengunjung dan yang dikunjungi di tempat kunjungan.

Selain itu juga terdapat petugas Portir atau petugas pengamanan yang bertanggung jawab untuk menjaga pintu gerbang yang menuju pintu Lapas atau pintu 1 dan pintu 2 di Gedung II Lapas Kelas I Cipinang. Petugas Pontir ini dibagi menjadi 4 regu dan 3 shift. Setiap regu dan setiap shiftnya terdiri dari 3 orang sehingga total keseluruhan petugas Pontir adalah 36 orang. Petugas Pontir memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

- 1) Petugas Portir I bertanggung jawab untuk membuka dan menutup pintu 1 dan bertanggung jawab terhadap keluar masuknya orang dan barang yang melalui pintu 1. Apabila ada pengunjung yang ingin masuk melalui pintu 1 harus dilihat lebih dulu melalui lubang pengintai pada pintu 1 sekaligus menanyakan maksud dan tujuan kunjungan.
- 2) Petugas portir 2 bertanggung jawab untuk membuka dan menutup pintu 2 dan bertanggung jawab terhadap keluar masuknya orang dan barang yang melalui pintu 2. Apabila ada pengunjung maka harus di cek kebenaran identitas yang bersangkutan,

Sebenarnya petugas yang melakukan penjagaan di dalam Lapas memang berjumlah 143 orang tetapi yang bertugas untuk melakukan patroli dan melakukan penjagaan di Blok Sel dan tempat narapidana berkegiatan adalah 68 orang. Dari 68 orang tersebut selanjutnya dibagi menjadi 4 peleton dan ditempatkan di 4 lokasi Blok (lebih lengkap dapat dilihat dalam lampiran). Pembagian tugas bagi petugas penjagaan adalah sebagai berikut:

- 1) Penjagaan Pos Utama.
- 2) Pos Menara
- 3) Pintu IV dan V
- 4) Blok Hunian
- 5) Apel Penghuni
- 6) Membuka kamar antara pukul 06.00 WIB – 07.00 WIB dan menutup kamar antara pukul 17.00 WIB – 17.30 WIB

Hasil Survey Sekuriti menunjukkan:

No	Uraian	Tingkat	Status	Keterangan
1	Jumlah anggota melebihi standart	5		
2	Jumlah anggota sesuai standart dan memiliki cadangan SDM	4	√	
3	Jumlah anggota pas sesuai standart	3		
4	Jumlah anggota kurang dari standart	2		
5	Tidak ada anggota	1		



Berdasarkan jumlah kekuatan Satuan Pengamanan di dalam Lapas Kelas I Cipinang dan dalam hal ini KPLP ditemukan bahwa jumlah personil masih sangat kurang dalam melakukan pengamanan dengan luas bangunan dan jumlah penghuni mencapai 2.000an narapidana sedangkan jumlah petugas hanya 143 orang saja. Padahal tanggung jawab petugas keamanan tidak hanya terhadap penghuni saja tetapi juga pengunjung dan juga petugas lainnya.

#### (b) Pagar

Gedung Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang sendiri memiliki pagar yang mengelilingi gedung-gedung di dalam Lapas tersebut. Pagar yang digunakan adalah pagar tembok dengan kawat baja berduri di bagian atas. Oleh karena itu berdasarkan sekuriti survey diketahui bahwa:

No	Uraian	Status	Keterangan
1	Pagar pembatas memenuhi standart keamanan dan berkualitas	√	
2	Pagar pembatas kurang memenuhi standart pengamanan dan kurang berkualitas		
3	Tidak ada pagar pembatas		

Pagar yang digunakan di Lapas Kelas I Cipinang sudah memenuhi standart yang ditentukan karena memang terbuat dari bahan berkualitas dengan memperhatikan tinggi masing-masing gedung sehingga memang dapat memberikan kesulitan bagi orang-orang yang hendak masuk dengan melalui pagar baik dari sisi dalam ataupun dari sisi luar. Pagar yang digunakan membuat orang-orang mengurungkan niatnya untuk memanjat pagar tersebut karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan untuk dipanjat.

#### (c) Pintu Gerbang

Pintu gerbang yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang terbagi atas 2 jenis. Pintu gerbang pertama dan pintu gerbang yang menghubungkan antara gedung II yang merupakan gedung berkegiatan narapidana dengan pintu gerbang yang menghubungkan antara gedung I dengan luar. Pada poin ini perhatian diberikan kepada pintu gerbang yang menghubungkan antara Gedung II dengan gedung I. Pintu gerbang ini dianggap penting dan mewakili karena setiap orang yang akan masuk ke tempat dimana para narapidana beraktifitas harus melewati pintu gerbang ini. Hasil sekuriti survey menunjukkan:

No	Uraian	Status	Keterangan
1	Pintu gerbang sesuai standart keamanan, berkualitas, dan terawat	√	
2	Pintu gerbang kurang sesuai standart keamanan, kurang berkualitas dan kurang terawat		
3	Tidak ada pintu gerbang		

Penilaian untuk pintu gerbang ini adalah sangat baik karena pintu gerbang ini disebut dengan pintu Pontir yang terbuat dari besi dan hanya dapat dibuka dari dalam. Sehingga untuk masuk ke dalam gedung ini harus mendapatkan ijin dari pihak dalam atau penjaga untuk membukakan pintu.

#### (d) Pos Sekuriti

Pos sekuriti yang ada di Lapas Kelas I Cipinang ini terdapat di depan kompleks Lembaga Pemasyarakatan Cipinang dan berada di samping portal. Berdasarkan penilaian hasil sekuriti survey:

No	Uraian	Status	Keterangan
1	Ruangan standart, fasilitas lengkap dan terawat		
2	Ruangan kurang standart, fasilitas kurang lengkap dan kurang terawatt	√	
3	Tidak ada Pos Komando		

Penilaian ini didasarkan kepada hasil observasi di lapangan dimana ruangan pos sekuriti yang ada di depan justru tidak ada petugas yang menjaga. Hal ini disebabkan karena terbatasnya jumlah personil. Selain itu ruangan tersebut justru kosong tanpa ada fasilitas apapun, hanya sebuah meja dan kursi. Memang setelah melalui pos sekuriti tersebut pengunjung akan melalui pos pemeriksaan lainnya yang memang fokus penjagaan dan pengamanan berada di dalam masing-masing Lapas yang ada di Cipinang. Oleh karena itu Pos sekuriti yang ada di depan justru terkesan ditinggalkan untuk meningkatkan efektifitas pengamanan di dalam Lapas itu sendiri.

#### (e) Pos Jaga

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa di dalam Lapas Kelas I Cipinang terdapat beberapa Pos Jaga yang tersebar di beberapa tempat. Berdasarkan hasil sekuriti survey maka penilaian terhadap poin ini adalah:

No	Uraian	Status	Keterangan
1	Pos jaga sesuai dengan standart baik secara fisik maupun sarana	√	
2	Pos jaga kurang sesuai dengan standart baik secara fisik maupun sarana		
3	Pos jaga jumlahnya tidak memadai dari kebutuhan		
4	Tidak ada pos jaga		

Pos jaga ini sebenarnya tidak semuanya berbentuk pos tapi disesuaikan dengan daerah tempat mereka melaksanakan penjagaan. Jika memang berada di wilayah *outdoor* tempat penghuni beraktifitas misalnya area tempat narapidana bekerja maka bentuknya pos. Namun berbeda ketika pos jaga ini berada di dalam ruangan

yang juga ditujukan untuk penjagaan misalnya memantau kegiatan pengunjung dan narapidana di ruang kunjungan atau pos jaga di depan untuk memeriksa pengunjung. Tetapi secara umum ditemukan bahwa pos-pos penjagaan ini umumnya sesuai dengan standart dan memadai untuk melaksanakan tugas penjagaan di masing-masing wilayah dan sesuai dengan tujuan dari pengamanan tersebut.

#### (f) Pos Menara

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang ini memiliki Pos Menara yang difungsikan sebagai pos pengawasan terhadap narapidana. Khususnya untuk mencegah narapidana yang mencoba melarikan diri. Berdasarkan hasil observasi maka penilaian sekuriti survey atas pos tersebut adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Status	Keterangan
1	Pos Menara sesuai dengan standart baik secara fisik maupun sarana	√	
2	Pos Menara kurang sesuai dengan standart baik secara fisik maupun sarana		
3	Pos Menara jumlahnya tidak memadai dari kebutuhan		
4	Tidak ada pos Menara		

Walaupun sebenarnya Lapas Kelas I Cipinang memiliki beberapa pos menara yang tersebar di setiap sudut sekeliling gedung, akan tetapi sekali lagi karena keterbatasan petugas pengamanan maka hanya setengahnya saja yang ditempati. Secara fisik bangunan dan sarana telah mencukupi untuk menunjang upaya pengawasan dan penjagaan akan tetapi tentu saja kelemahannya adalah wilayah yang tercover dengan pengawasan pos menara ini tidak efektif.

#### (g) Lampu Penerangan

Kondisi penerangan di Lapas Kelas I Cipinang telah cukup memadai sehingga memang mengurangi *blind spot* yang ada di dalam Lapas. Berdasarkan hasil survey sekuriti adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Status	Keterangan
1	Lampu penerangan berfungsi dengan baik dan dapat mengcover penerangan	√	
2	Lampu penerangan kurang berfungsi dapat mengcover penerangan		
3	Ada tempat yang belum ada penerangan		
4	Tidak ada lampu penerangan		

Semua penerangan yang ada di dalam Lapas Kelas I Cipinang berfungsi dengan baik dan dapat meng-cover wilayah tersebut sehingga keberadaan tempat-tempat

yang tanpa penerangan dan dapat disalahgunakan dapat diminimalisasi sehingga penjagaan menjadi lebih efektif.

#### (h) Alat Komunikasi

Penggunaan alat komunikasi dalam menunjang pengamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang telah cukup efektif dan dirasa telah dapat berfungsi dan difungsikan dengan baik oleh para petugas. Berdasarkan hasil observasi sekuriti survey maka diketahui hasil sebagai berikut:

No	Uraian	Status	Keterangan
1	Alat komunikasi berfungsi dengan baik dan ditempatkan di POSKO	√	
2	Alat komunikasi lebih dari satu jenis dan berfungsi dengan baik		
3	Alat komunikasi lebih dari satu jenis dan kurang berfungsi dengan baik		

Alat komunikasi tidak hanya di tempatkan di posko saja tetapi juga beberapa dipegang oleh Kepala KPLP dan Komandan serta Wakil Komandan jaga. Hal ini menyebabkan kontrol dan komunikasi terkait situasi dengan cepat dapat disampaikan dan dapat dilakukan pengambilan keputusan dengan cepat pula.

#### (i) Sistem Alarm

Sistem alarm yang digunakan di dalam Lapas Kelas I Cipinang memiliki sistem alarm yang digunakan misalnya alarm kebakaran. Berdasarkan hasil observasi sekuriti survey maka diketahui bahwa;

No	Uraian	Status	Keterangan
1	Alarm sesuai dengan standart dan berfungsi dengan baik	√	
2	Alarm kurang sesuai dengan standart dan kurang berfungsi dengan baik		
3	Kamera berfungsi dengan baik dan terawat		
4	Kamera kurang berfungsi dengan baik dan kurang terawat		
5	Ada dan rusak		
6	Tidak ada		

Selain itu, pihak keamanan Lapas Kelas I Cipinang juga membangun suatu sistem alarm atau sistem peringatan terkait dengan kondisi-kondisi khusus. Kondisi yang dinyatakan sebagai kondisi khusus adalah terjadinya kerusakan di dalam Lapas atau ada narapidana yang sedang berusaha kabur dari Lapas.

#### (j) Perlengkapan Petugas

Perlengkapan petugas yang digunakan oleh petugas KPLP sebenarnya tidak ada perlengkapan khusus dan cenderung tidak menggunakan apa-apa. Seragam yang digunakan rapi dan sesuai. Berdasarkan hasil observasi survey sekuriti ditemukan bahwa;

No	Uraian	Status	Keterangan
1	Peralatan lengkap, kualitasnya baik, seragam bersih dan rapih, jumlahnya sesuai dengan kebutuhan		
2	Peralatan kurang lengkap, kurang baik kualitasnya, seragamnya kurang rapi dan bersih, jumlahnya kurang tidak sesuai kebutuhan		
3	Peralatan ada tapi apa adanya	√	
4	Tidak ada perlengkapan tugas anggota		

Peralatan yang digunakan oleh petugas KPLP yaitu borgol dan memang petugas KPLP sendiri dilengkapi dengan senjata api akan tetapi senjata tersebut diletakkan di ruang penyimpanan dan baru akan digunakan ketika keadaan dan situasi benar-benar genting. Tidak ada senjata lain seperti pentungan yang dibawa oleh petugas KPLP dan mereka hanya mengandalkan hubungan sosial dengan narapidana dan kewibawaan sehingga beberapa kali memang proses penggeledahan atau pengamanan menyulut perkelahian antara petugas dengan narapidana.

#### (k) Peralatan P3K

Sebenarnya peralatan P3K yang dimiliki oleh petugas KPLP tidak begitu banyak ataupun begitu lengkap. Hal ini disebabkan karena sebenarnya di dalam Lapas Kelas I Cipinang sendiri memiliki Klinik dan bahkan di dalam Kompleks Lembaga Pemasyarakatan Cipinang memiliki rumah sakit sendiri. Oleh karena itu walaupun sebenarnya peralatan P3K yang dibawa oleh petugas terbatas namun karena di dalam Lapas Kelas I Cipinang terdapat klinik maka hasil observasi sekuriti survey sebagai berikut;

No	Uraian	Status	Keterangan
1	Peralatan lengkap sesuai standart dan ditempatkan ditempat yang mudah dijangkau	√	
2	Peralatan kurang lengkap, kurang standart, dan kurang terjangkau		
3	Tidak ada perlengkapan P3K		

Klinik yang ada di dalam Lapas digunakan untuk memberikan pertolongan pertama sehingga jika terjadi suatu kondisi yang membutuhkan penanganan medis sederhana maka akan dibawa ke klinik. Tetapi jika ternyata membutuhkan penanganan yang cukup serius maka akan dibawa ke Rumah Sakit di Kompleks Lapas Cipinang tersebut. Jika memang membutuhkan penanganan yang lebih serius

maka nantinya akan dirujuk ke rumah sakit lain yang lebih besar di luar kompleks Lembaga Pemasyarakatan Cipinang.

#### (l) Sistem Keluar-Masuk Ruangan

Sistem keluar masuk ruangan yang ada di dalam Lapas Kelas I Cipinang dari strukturnya sebenarnya telah sangat memadai. Oleh karena itu berdasarkan hasil sekuriti survey adalah sebagai berikut;

No	Uraian	Status	Keterangan
1	Sangat sesuai kebutuhan, konstruksi baik dan terawat dengan baik	√	
2	Sesuai kebutuhan dan terawat		
3	Sesuai kebutuhan dan kurang terawat		
4	Ada akan tetapi tidak memiliki daya tangkal		
5	Ada tetapi tidak dapat ditutup		
6	Tidak ada pintu		

Berlapis-lapis pintu yang digunakan untuk masuk ke dalam area-area yang digunakan oleh narapidana beraktifitas memang dirancang secara baik dan memiliki kunci-kunci yang hanya dipegang oleh petugas saja. Sehingga pengaturan keluar masuk ruangan dapat dilakukan dengan baik.

#### (m) Metal Detector

Penggunaan *metal detector* ada di pos pemeriksaan yang ada di depan dekat pintu Pontir yang menghubungkan gedung II dengan gedung I ataupun dengan luar. Penggunaan *metal detector* ditujukan bagi pengunjung atau petugas yang akan masuk ke gedung dimana narapidana beraktifitas. Maka berdasarkan hasil sekuriti survey didapatkan hasil sebagai berikut;

No	Uraian	Status	Keterangan
1	Sesuai, terawat, digunakan secara tetap setiap saat terhadap tamu maupun karyawan sendiri	√	
2	Sesuai, terawat, digunakan bilamana perlu selektif		
3	sesuai, kurang terawat, digunakan untuk tamu selektif		
4	Kurang memadai, kurang terawat dan jarang digunakan		
5	Tidak ada		

Penggunaan *metal detector* ini bertujuan untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang seperti handphone atau senjata tajam ke dalam Lapas yang bisa saja dibawa oleh pengunjung ataupun oleh petugas untuk diselundupkan ke dalam lingkungan Lapas.

## 2. Sistem Operasional

### (a) Pengaturan Tugas Siaga

Pengaturan tugas ini sangat dipengaruhi dengan jumlah petugas yang ada. Masalah pembagian shift ini sebenarnya dilakukan dengan menyesuaikan jumlah petugas yang ada. Berdasarkan hasil survey sekuriti diketahui bahwa;

No	Deskripsi	Tingkat	Status
1	Diatur 2/3 shift dari 3/4 regu shift. Jumlah kekuatan sesuai dengan kebutuhan pengamanan. Tenaga cadangan dipersiapkan	5	
2	Diatur 2/3 shift dari 3/4 shift. Jumlah kekuatan sesuai dengan kebutuhan pengamanan. Tenaga cadangan kurang dipersiapkan	4	
3	Diatur 2/3 shift dari 3/4 regu shift. Jumlah kekuatan sesuai dengan kebutuhan pengamanan. Tenaga cadangan tidak ada	3	
4	Diatur 2/3 shift dari 3/4 regu shift. Jumlah kekuatan kurang/tidak sesuai dengan kebutuhan pengamanan. Tenaga cadangan tidak ada	2	√
5	Tidak diatur 2/3 shift dari 3/4 regu shift. Jumlah kekuatan tidak sesuai dengan kebutuhan pengamanan. Tenaga cadangan tidak ada	1	
6	Tidak ada pengaturan jadwal jaga	0	

Seperti yang telah disebutkan bahwa permasalahan yang ditemukan dalam petugas pengamanan KPLP sendiri adalah jumlah petugas yang sangat terbatas. Hal ini menyebabkan pengaturan penjagaan dan patroli disesuaikan dengan jumlah petugas yang ada. Untuk jadwal pembagian shift penjagaan dan patroli di dalam Lapas Kelas I Cipinang dapat dilihat di lampiran.

### (b) Komando Pengendalian Pengamanan Fisik

Komando pengendalian pengamanan di dalam Lapas secara umum berada di bawah komando Kepala KPLP. Walaupun pada pelaksanaan penjagaan di lapangan dibentuk lagi Komandan Jaga Harian dan Wakil Komandan Jaga akan tetapi komando tertinggi adalah Kepala KPLP. Berdasarkan hasil survei sekuriti maka ditemukan hasil sebagai berikut;

No	Deskripsi	Tingkat	Status
1	Pengendalian pengamanan berfungsi dengan baik. Kegiatan fisik pengamanan dilakukan sesuai dengan SOP dan Job Description dengan tertib dan terdokumentasi dengan baik	5	√

2	Pengendalian pengamanan berfungsi. Kegiatan fisik pengamanan dilakukan sesuai dengan SOP dan Job Description dan terdokumentasi dengan baik	4	
3	Pengendalian pengamanan kurang berfungsi. Kegiatan fisik pengamanan dilakukan kurang sesuai dengan SOP dan Job Description dan terdokumentasi dengan kurang baik	3	
4	Pengendalian pengamanan kurang berfungsi. Kegiatan fisik pengamanan dilakukan tidak sesuai dengan SOP dan Job Description dan dilakukan secara sporadis	2	
5	Pengendalian pengamanan tidak berfungsi. Kegiatan fisik pengamanan dilakukan tidak sesuai dengan SOP dan Job Description dan dilakukan ala kadarnya	1	
6	Tidak ada kodal	0	

Pengendalian pengamanan yang dilakukan oleh KPLP memang telah sesuai dengan SOP yang ada, namun pada pelaksanaan di lapangan diakui bahwa banyak hal-hal teknis yang harus mereka inisiasi sendiri karena memang tidak diatur di dalam SOP tersebut.

#### (c) Penempatan Pos Jaga

Masalah penempatan pos jaga di dalam lingkungan Lapas Kelas I Cipinang telah memenuhi persyaratan dan kebutuhan. Oleh karena itu berdasarkan hasil sekuriti survey didapatkan hasil sebagai berikut;

No	Deskripsi	Tingkat	Status
1	Sangat sesuai kebutuhan, konstruksi baik, dan terawat dengan baik	5	√
2	Sesuai kebutuhan dan terawat	4	
3	Sesuai kebutuhan, kurang terawat	3	
4	Ada akan tetapi tidak strategis	2	
5	Ada tetapi tidak strategis dan tidak terawat	1	
6	Tidak ada pos jaga yang sesuai kebutuhan	0	

Penempatan pos jaga di dalam Lapas Kelas I Cipinang ini memang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan. Sejak awal pembuatan Lapas ini maka unsur yang paling diperhatikan di dalam arsitektur bangunannya adalah perihal keamanannya itu sendiri. Hal ini dilakukan karena menyadari bahwa resiko terjadinya kejahatan dan pelanggaran di dalam Lapas begitu besar.

#### (d) Patroli

Patroli yang dilakukan oleh petugas KPLP memiliki 2 tipe patroli yaitu patroli rutin dan patroli insidentil. Patroli rutin tidak hanya siang dan malam hari saja tetapi



setiap beberapa jam sekali dilakukan patroli rutin. Sedangkan patroli insidental dilakukan ketika ada laporan desas-desus akan ada kegiatan atau barang yang terlarang masuk ke dalam Lapas. Oleh karena itu berdasarkan penilaian sekuriti survey maka hasilnya adalah;

No	Deskripsi	Tingkat	Status
1	Patroli waktu siang dan malam hari terkontrol dengan checklist dan WMC secara teratur	5	
2	Patroli waktu siang dan malam hari terkontrol dengan checklist atau WMC secara teratur	4	
3	Patroli waktu siang dan malam hari terkontrol dengan checklist atau WMC	3	
4	Patroli waktu siang dan malam hari terkontrol dengan checklist atau WMC tetapi kurang teratur	2	
5	Patroli waktu siang dan malam hari terkontrol	1	√
6	Tidak ada	0	

Patroli yang dilaksanakan secara rutin tidak dilakukan pencatatan. Pencatatan dilakukan ketika terdapat temuan atau barang sitaan ataupun kejadian saat patroli dilakukan. Walaupun begitu, patroli tetap terkontrol dengan baik karena patroli dilaksanakan hampir 4 jam sekali maka pencatatan hanya dilakukan ketika menemukan permasalahan saja.

#### (e) Pengawasan Patroli

Pengawasan patroli dilakukan oleh komandan jaga masing-masing peleton dan tetap dibawah kontrol Ketua KPLP sebagai struktur komando tertinggi dalam pengamanan Lapas. Oleh karena itu berdasarkan survey sekuriti mendapatkan hasil sebagai berikut;

No	Deskripsi	Tingkat	Status
1	Pengawasan secara terpadu (dari danru, koordinator hingga chief). Dikontrol secara ketat, memenuhi sesuai prosedur. Terdokumentasi dengan baik	5	
2	Pengawasan secara terpadu (dari danru, koordinator hingga chief). Dikontrol dan memenuhi sesuai prosedur. Terdokumentasi dengan baik	4	
3	Pengawasana secara terpadu (dari danru, koordinator hingga chief). Dikontrol dan memenuhi sesuai prosedur.	3	√
4	Pengawasana secara terpadu (dari danru, koordinator hingga chief).	2	

5	Pengawasan hanya oleh atasannya saja	1	
6	Tidak ada pengawasan	0	

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pelaksanaan patroli tidak didokumentasikan dengan baik dan hanya dilakukan saat ada kondisi khusus ataupun mendapatkan temuan barang-barang terlarang.

#### (f) Pengawasan Tamu dan Karyawan

Masalah pengawasan tamu dan karyawan memang menjadi tanggung jawab petugas KPLP. Namun dalam pelaksanaannya melakukan pengawasan terhadap tamu, petugas KPLP dibantu dengan petugas Lapas lainnya khususnya di ruang kunjungan. Hal ini disebabkan jumlah pengunjung Lapas yang begitu banyak sehingga tidak dapat ditangani oleh petugas KPLP saja. Selain itu KPLP juga memiliki pengawasan internal bagi petugas lain yang bekerja di dalam Lapas Kelas I Cipinang. Oleh karena itu berdasarkan sekuriti survey didapatkan hasil sebagai berikut;

No	Deskripsi	Tingkat	Status
1	Pengawasan secara terpadu. Ada prosedur tanda pengenalan. Setiap keluar masuk orang menggunakan tanda pengenalan. Setiap saat satpam mengontrol tanda pengenalan orang yang keluar-masuk. Ada buku tamu yang terekam secara ketat	5	
2	Ada prosedur tanda pengenalan. Setiap keluar masuk orang menggunakan tanda pengenalan. Setiap saat satpam mengontrol tanda pengenalan orang yang keluar masuk. Ada buku tamu	4	
3	Setiap keluar masuk orang menggunakan tanda pengenalan. Setiap saat satpam mengontrol tanda pengenalan orang yang keluar-masuk	3	
4	Setiap keluar masuk orang menggunakan tanda pengenalan. Setiap saat satpam mengontrol tanda pengenalan orang yang keluar-masuk	2	
5	Tidak semua orang yang keluar masuk menggunakan tanda pengenalan	1	√
6	Semua orang yang keluar masuk tidak menggunakan tanda pengenalan	0	

Tidak semua tamu atau pengunjung menggunakan tanda pengenalan. Tanda pengenalan hanya diperuntukkan bagi pengunjung atau tamu laki-laki. Tamu laki-laki harus menyerahkan identitas dan ditukar dengan tanda pengenalan juga mendapatkan cap dari petugas. Hal ini dikarenakan Lapas Kelas I Cipinang adalah Lapas untuk narapidana laki-laki sehingga hal tersebut dilakukan

untuk menghindari ada narapidana yang berusaha kabur dengan menyamar sebagai pengunjung.

### **Analisis Berdasarkan *Crime Prevention Trough Environmental Design***

Berdasarkan pemaparan dan hasil sekuriti survey masing-masing poin maka untuk melihat apakah sistem pengamanan yang dilaksanakan sudah baik atau tidak maka dapat dilihat secara keseluruhan. Selain itu dapat dilihat di bagian mana-mana saja yang masih menjadi kelemahan dalam sistem pengamanan di dalam Lapas Kelas I Cipinang. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut;

No.	Deskripsi	Penilaian					Nilai
		0	1	2	3	4	
<b>I. INFRASTRUKTUR PENGAMANAN FISIK</b>							
1	Satuan Pengamanan						4
2	Pagar						5
3	Pintu Gerbang						5
4	Pos Sekuriti						3
5	Pos Jaga						5
6	Pos Menara						5
7	Lampu Penerangan						5
8	Alat Komunikasi						5
9	Sistem Alarm						5
10	Perlengkapan Petugas						2
11	Peralatan P3K						5
12	Sistem Keluar Masuk Ruangan						5
13	<i>Metal Detector</i>						5
<b>II. SISTEM OPERASIONAL</b>							
1	Pengaturan Tugas Siaga						2
2	Komando Pengendalian Pengamanan Fisik						5

3	Penempatan Pos Jaga							5
4	Patroli							1
5	Pengawasan Patroli							3
6	Pengawasan Tamu dan Karyawan							2

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari sisi pengamanan fisik, kelemahan terlihat pada poin 4 dan 10 yaitu Pos Sekuriti dan Perlengkapan Petugas KPLP. Sedangkan di dalam sistem operasional ternyata dapat dilihat bahwa apa yang dilakukan KPLP belum begitu rapi dalam hal sistem. Poin yang mendapatkan penilaian baik hanyalah dari segi Komando Pengendalian Pengamanan Fisik dan Penempatan Pos Jaga, sedangkan poin lainnya masih sangat kurang.

Oleh karena itu sebagai rekomendasi, poin paling penting untuk diperbaiki atau ditingkatkan adalah masalah perlengkapan petugas yang dapat digunakan sehari-hari. Paling minimal petugas KPLP ini membawa borgol dan pentungan atau alat kejut listrik yang dapat membantu melumpuhkan kawan dan bersifat sementara. Hal ini penting untuk menjaga keamanan petugas sendiri ketika melakukan patroli atau penjagaan. Selain itu yang harus mendapatkan perhatian adalah poin Patroli dan Pengawasan terhadap Tamu dan Karyawan. Patroli yang dilakukan mungkin sudah baik akan tetapi dari segi dokumentasi dan pencatatan masih sangat kurang. Walaupun tidak terjadi hal-hal tertentu dalam patroli tersebut namun pencatatan harus tetap dilakukan sebagai tolak ukur pelaksanaan patroli itu sendiri.

Sedangkan pada Pengawasan Tamu seharusnya tidak hanya pengunjung laki-laki yang harus menyerahkan identitas tetapi juga pengunjung perempuan. Sehingga ketika terjadi temuan penyelundupan barang terlarang ke dalam lapas maka dapat segera diketahui siapa yang membawa barang tersebut dan memberikannya pada narapidana di dalam. Hal ini tentu saja akan mempercepat proses penelusuran petugas kepada pelaku yang membantu narapidana dari luar.

Analisis yang dilakukan dengan menggunakan CPTED untuk infrastruktur pengamanan fisik dan sistem operasional maka berdasarkan data yang diperoleh, yang paling memungkinkan adalah melakukan analisis dengan *Increasing Perceived Effort* dan *Increasing Perceived Risks*. Tidak semua poin dalam *increasing perceived effort* dan *increasing perceived risks* dapat diakomodasi dan dalam analisis ini dipilih beberapa poin saja yang diterapkan dalam Lapas Kelas I Cipinang.

(a) *Increasing Perceived Effort*

- *Target Hardening*

Penerapan *target hardening* di dalam Lapas Kelas I Cipinang dapat ditemukan dalam penggunaan kunci tambahan pada pintu-pintu kamar dan pintu blok hunian. Dalam penerapan CPTED biasanya terkait dengan kejahatan terhadap properti namun dalam konteks sistem pengamanan di dalam Lapas maka yang menjadi target adalah narapidana atau penghuni sendiri dan mencegah bagaimana mereka agar tetap berada di dalam Lapas. Berdasarkan hal tersebut maka penggunaan kunci tambahan pada kamar dan pintu blok hunian menjadi salah satu bentuk penerapan *target hardening* itu sendiri di dalam Lapas Kelas I Cipinang.

- *Access Control*

Pada intinya *access control* bertujuan untuk mencegah pelaku masuk ke dalam sebuah kawasan atau lingkungan dengan mengawasi jalur masuk ke dalam/keluar lingkungan tersebut. Sedangkan penerapannya di dalam Lapas Kelas I Cipinang tujuannya adalah untuk mencegah adanya penghuni atau narapidana keluar lingkungan Lapas dengan berpura-pura sebagai pengunjung. Selain itu masalah penerapan *access control* ini di dalam Lapas ini terdapat perbedaan untuk pengunjung laki-laki dan perempuan. Pengunjung laki-laki akan mendapatkan cap di tangannya sebagai bukti bahwa dia adalah pengunjung.

Prosedur *access control* yang dilakukan di dalam Lapas Kelas I Cipinang bagi pengunjung adalah sebagai berikut:

- a) Pengunjung setelah masuk melalui pintu pontir selanjutnya menuju meja jaga.
- b) Pengunjung menyerahkan identitas baik berupa KTP atau SIM di meja jaga tersebut dan ditukar dengan kartu pengunjung.
- c) Selanjutnya petugas akan memberikan cap di tangan pengunjung laki-laki sebagai bukti.
- d) Setelah kunjungan berakhir maka pengunjung akan menuju meja jaga dan menukar kartu tanda pengunjung dengan kartu identitas yang telah diserahkan sebelumnya
- e) Selanjutnya pengunjung akan keluar melalui pintu pontir yang sama dengan ketika pengunjung masuk.

Selain itu untuk penerapan *access control* karena pada intinya adalah membatasi akses maka di dalam Lapas Kelas I Cipinang juga diterapkan dalam penggunaan pintu masuk, pagar, dan penghalang sebelum memasuki lingkungan Lapas Kelas I Cipinang.

(b) *Increasing Perceived Risks*

- *Entry/Exit Screening*

Penerapan *entry-exit screening* di Lapas Kelas I Cipinang dilakukan untuk menghindari adanya barang terlarang yang dibawa pengunjung masuk ke dalam lingkungan Lapas. *Screening* tidak hanya dilakukan pada barang bawaan saja tetapi juga dilakukan *body check* terhadap pengunjung. Khusus untuk pengunjung perempuan telah disiapkan ruangan terpisah dan tertutup dengan petugas periksa perempuan.

Penerapan *screening* ini berada di depan pintu masuk pertama, setelah pengunjung melalui pintu Pontir dan kemudian menyerahkan Kartu Identitas. Setelah itu pengunjung akan melewati *metal detector* dan kemudian baru menjalani pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan.

- *Formal Surveillance*

*Formal surveillance* sendiri sebenarnya adalah pengawasan yang dilakukan oleh petugas keamanan pada daerah atau lingkungan yang diawasinya. Pengawasan ini dapat dilaksanakan secara langsung ataupun dengan menggunakan alat seperti CCTV. Penerapan *formal surveillance* di Lapas Kelas I Cipinang dilakukan dengan kedua tipe tersebut yaitu dilakukan secara langsung oleh petugas keamanan atau dalam hal ini KPLP dan dilakukan dengan menggunakan CCTV. Sehingga petugas cukup memonitor suasana suatu area dengan melihat monitor CCTV saja.

- *Surveillance by Employee*

*Surveillance by employees* maksudnya adalah pengawasan yang dilakukan oleh petugas lainnya walaupun sebenarnya petugas tersebut bukanlah petugas keamanan. Penerapan *surveillance by employees* di dalam Lapas Kelas I Cipinang ini sebenarnya telah banyak dilakukan oleh petugas-petugas masyarakat lainnya. Menyadari bahwa jumlah petugas keamanan yang sangat terbatas maka petugas-petugas lainnya melakukan pengawasan juga di tempat mereka bekerja. Seperti misalnya adalah petugas yang mengatur waktu dan *flow* pengunjung di ruang kunjungan akhirnya merangkap peran sebagai pengawas di daerah tersebut.

## Penutup

Pada umumnya sistem pengamanan yang diterapkan di dalam Lapas Kelas I Cipinang secara fisik sudah sangat baik. Kondisi pengamanan fisik mulai pintu, pagar, dan kemudian penerangan sudah dapat secara efektif mengcover dan mencegah terjadinya kejahatan. Tujuan utama dilaksanakannya pengamanan di

dalam Lapas ini lebih pada menciptakan suatu kondisi yang kondusif dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.

Oleh karena itu pengamanan lebih fokus pada upaya meminimalisasi tindakan-tindakan yang menyebabkan kerusakan seperti perkelahian, menggagalkan upaya narapidana untuk kabur dari Lapas, dan mencegah barang-barang terlarang masuk ke dalam Lapas. Berdasarkan tujuan tersebut maka kami simpulkan bahwa pengamanan fisik yang dilakukan telah cukup efektif dalam mencapai tujuan tersebut.

Permasalahan utama dari sistem pengamanan yang diterapkan di dalam Lapas Kelas I Cipinang adalah masalah keterbatasan jumlah tenaga pengamanan. Padahal tanggung jawab petugas keamanan ini atau yang disebut KPLP tidak hanya pada narapidana tetapi juga petugas lainnya dan juga pengunjung yang datang. Melihat fakta bahwa begitu banyak orang yang ada di dalam Lapas Kelas I Cipinang dalam satu waktu maka memang seharusnya dilakukan peningkatan sumber daya manusia untuk pengamanan. Hal ini penting karena ketika sarana dan prasarana telah mendukung dilakukannya pengamanan yang efektif namun tidak ada petugas yang dapat mengoperasikannya karena kurang petugas maka hal tersebut menjadi sia-sia.

Saran penulis terhadap sistem pengamanan yang diterapkan di dalam Lapas Kelas I Cipinang adalah: (1) Meningkatkan jumlah petugas keamanan. Jika dibandingkan rasio antara petugas dengan jumlah narapidana saja sudah timpang jauh yaitu 143 petugas dibanding 2000 sekian narapidana. Hal inilah nantinya yang akan mendorong terjadinya pertukaran sosial antara petugas dengan narapidana. (2) Mengadakan pelatihan khusus bagi tenaga pengamanan di dalam Lapas. Hal ini disebabkan karena penanganan-penanganan secara teknis masalah pengamanan di dalam Lapas tidak pernah diberikan sebelumnya. Sehingga petugas-petugas ini akhirnya *learning by doing* saja dari para seniornya ketika bertugas di dalam Lapas. Hal ini akan menjadi lebih baik jika pelatihan diadakan justru sebelum mereka bertugas sehingga mereka sudah memiliki gambaran apa yang harus dilakukan. (3) Merapikan dokumentasi dan administrasi dari satuan pengamannya itu sendiri. Misalnya dokumentasi patroli rutin atau insidental yang selama ini memang tidak dilakukan pencatatan. Seharusnya pencatatan dan dokumentasi tetap dilakukan baik ada atau tidak ada masalah yang ditemukan saat patroli dilakukan.

#### **Daftar Pustaka**

Atlas, R. I. (2008). *21st Century Security and CPTED: Designing for Critical Infrastructure Protection and Crime Prevention*. New York: Taylor & Francis Group.

- Clarke, R. V. (1997). *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies* (2nd Edition ed.). New York: Harrow and Heston.
- Dermawan, M. K. (1994). *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fennelly, L. J. (2004). *Effective Physical Security* (3rd Edition ed.). Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.
- Geason, S., & Wilson, P. R. (1988). *Crime Prevention: Theory and Practice*. Canberra: Australian Institute of Criminology.
- Geason, S., & Wilson, P. R. (1989). *Designing Out Crime: Crime Prevention Through Environmental Design*. Canberra: Australian Institute of Criminology.